

COMMUNITY BASED TOURISM DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA MANGROVE DEMANG GEDI DI KABUPATEN PURWOREJO

Melsa Adelia Maharani, Puji Astuti, Neny Marlina

melsmhrn@gmail.com, pujiundip@gmail.com, nenymarlina@live.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro, Jawa Tengah
Website : <https://fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bentuk pengelolaan pariwisata *Community Based Tourism* (CBT) yang ada di Kabupaten Purworejo dimana pengelolaan pariwisata CBT berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mana telah menjadi isu menarik dalam beberapa tahun terakhir dalam dunia pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Gedangan, masyarakat Desa Gedangan, dan pengelola Desa Wisata Gedangan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan pariwisata Mangrove Demang Gedi berbasis *Community Based Tourism* dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap perencanaan yang memuat rencana pembentukan desa wisata dan penyuluhan sadar wisata dari pemerintah desa. Tahap pelaksanaan memuat pelaksanaan kegiatan desa wisata dimana masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan sarana prasarana pariwisata serta ikut serta dalam pelatihan dan bimbingan yang diadakan baik oleh pemerintah daerah, pemerintah desa maupun pihak ketiga. Tahap pengawasan dan evaluasi memuat pertemuan rutin yang menyediakan ruang publik untuk memonitoring dan mengevaluasi jalannya kegiatan desa wisata dengan cara menyampaikan saran, kritik, dan masukan bagi pengelola dan pemerintah desa. Pengelolaan pariwisata ini memberikan manfaat yaitu: 1) meningkatnya keterampilan dan kemandirian masyarakat, 2) meningkatnya kualitas hidup masyarakat, 2) tergalinya sumber daya alam dan budaya secara maksimal.

Kata Kunci: pengelolaan wisata, *community based tourism*, pemberdayaan masyarakat, desa wisata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan nasional sangat berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata daerah. Hal ini karena pariwisata daerah merupakan bagian dari pariwisata nasional. Sejak desentralisasi dan otonomi ditetapkan, daerah diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang-undang. Demikian pula dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan potensi pariwisata daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009, menurut Argo Demartoto¹ proses pengelolaan pariwisata sendiri mempunyai dua bentuk pengelolaan yaitu *Community Based Tourism* atau CBT dan Pengelolaan Pariwisata Top Down. Pengelolaan pariwisata berlandaskan masyarakat didasarkan pada konsep kesepadanan dan kesesuaian antara kepentingan para *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Idealnya, gagasan *Community Based Tourist*, atau CBT, merupakan

interpretasi dari konsep pengembangan pariwisata yang diamanatkan UU Kepariwisataan. Pendekatan pengelolaan wisata ini dipusatkan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Oleh karena tujuan akhir yang ingin dicapai meliputi menyejahterakan taraf hidup masyarakat maka masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari kegiatan merencanakan, membangun, mengelola, mengembangkan, dan monitoring, serta melakukan penilaian.

Salah satu bentuk pengelolaan pariwisata CBT terdapat di Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo sendiri merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang kaya akan potensi pariwisata khususnya wisata alam, budaya, religi dan kuliner karena letaknya yang dibatasi oleh Pegunungan Serayu di sebelah selatan, dan Gunung Sumbing di sebelah utara, serta pegunungan menoreh di timur dan Samudra Hindia di selatan dan dataran Kebumen-Banyumas di sebelah barat. Dengan begitu banyaknya potensi pariwisata yang ada, dan pengelolaan yang dikuasai oleh pemerintah terbatas sehingga beberapa potensi pariwisata ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat menjadi obyek pariwisata dengan bentuk *Community Based Tourism*

¹Argyo Demartoto. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: UNS

atau yang lebih sering dikenal dengan pengelolaan desa wisata.

Namun sejak tahun 2017 eksistensi obyek wisata Mangrove Demang Gedi ini menurun. Alasan apa yang membuat Taman Edukasi Mangrove Demang Gedi tidak memiliki eksistensi sebaik desa wisata lain dan bagaimana pengelolaan pariwisata *Community Based Tourism* di Taman Edukasi Mangrove Demang Gedi diterapkan serta bagaimana manfaatnya bagi pemberdayaan masyarakat menjadi poin penting dalam penelitian ini.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengelolaan obyek wisata Mangrove Demang Gedi yang dikelola berdasarkan bentuk CBT, sejauh mana peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di obyek wisata Mangrove Demang Gedi. Serta bagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat disekitar obyek pariwisata Mangrove Demang Gedi dengan bentuk pengelolaan CBT.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan pariwisata Mangrove Demang Gedi yang dilakukan melalui konsep *Community Based Tourism*?

2. Bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat di sekitar obyek wisata Mangrove Demang Gedi dengan bentuk pengelolaan pariwisata yang diterapkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pengelolaan pariwisata Mangrove Demang Gedi yang diterapkan melalui CBT di Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mendeskripsikan manfaat yang dirasakan masyarakat di sekitar obyek pariwisata dengan adanya pola pengelolaan pariwisata yang diterapkan.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Desa Wisata

Menurut Made Heny, desa wisata adalah jenis wisata di mana sekelompok kecil pengunjung tinggal di atau dekat kehidupan konservatif atau di desa yang tersisih dengan mempelajari mengenai kehidupan desa sekitar². Timor Mahardika berpendapat bahwa proses partisipasi dan pembentukan desa wisata dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperluas kemampuan kelembagaan masyarakat lokal melalui proses pembelajaran, dimana

² Made Heny Urmila Dewi. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, Vol. 3 No. 2 hlm 131. Bali : Universitas Udayana.

masyarakat dilibatkan dalam berbagai aspek pemberdayaan³.

2. Peran Pemerintah Dalam Pariwisata

Pitana dan Gayatri⁴ mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk ikut andil dalam pengembangan potensi wisata daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Peran serta pemerintah daerah sebagai motivator dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan agar sektor pariwisata tetap dapat berfungsi dengan baik. Masyarakat, pemodal, dan pelaku usaha dalam industri pariwisata menjadi tujuan utama yang seharusnya didorong terus-menerus supaya pengembangan pariwisata meraup kesuksesan.
- b. Fasilitator, tugas pemerintah sebagai fasilitator pertumbuhan potensi wisata yaitu mempersiapkan seluruh sarana yang mendukung semua program pengelolaan wisata yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun oleh masyarakat. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak swasta dan masyarakat dalam praktiknya.
- c. Sebagai dinamisator, di bawah pilar *good governance*, pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta harus

dapat bekerja sama agar pembangunan dapat berlangsung secara optimal. Fungsi utama pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata adalah melakukan sinergi terhadap ketiga pihak tersebut agar terjalin hubungan saling menguntungkan satu sama lain untuk pertumbuhan pariwisata.

3. Pengelolaan Pariwisata *Community Based Tourism*

Menurut Argo Demartoto, proses pengelolaan pariwisata mempunyai dua bentuk pengelolaan yaitu *Community Based Tourism* atau CBT dan Pengelolaan Pariwisata *Top Down*. Pengelolaan pariwisata berlandas masyarakat didasarkan pada konsep kesepadanan dan kesesuaian antara keperluan para pemangku kepentingan dalam lingkup pengembangan pariwisata, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) dalam bentuknya yang ideal, mendorong pengembangan pariwisata dari, oleh, dan untuk masyarakat. Masyarakat sekitar harus berperan serta secara aktif dan diberi kesempatan untuk terlibat dalam semua tahapan pembangunan, mulai kegiatan merencanakan, membangun, mengelola, mengembangkan, dan

³ Timor mahardika. (2001). *Pendidikan politik pembangunan desa*. Pustaka utama: Yogyakarta.

⁴ *op.cit.*, lih (5) hlm 95

monitoring, serta melakukan penilaian. Hal tersebut dikarenakan tujuan akhir yang ingin dicapai berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar⁵.

Sebagai pemain utama dalam pembangunan *Community Based Tourism*, masyarakat terlibat dalam semua tahap pembangunan, dimana masyarakat bertindak sebagai evaluator, investor, pelaksana, pemantau, pengelola, dan sekaligus perencana. Meskipun pengembangan pariwisata berlandaskan masyarakat mengutamakan pertimbangan masyarakat, hal itu juga membutuhkan kolaborasi dari pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah dan sektor swasta. Keberhasilan pengembangan pariwisata di suatu wilayah akan ditentukan oleh masyarakat setempat atau oleh individu-individu yang bertempat tinggal di dekat tempat-tempat wisata tersebut.

4. Partisipasi Masyarakat

Istilah "partisipasi masyarakat" mengacu pada keterlibatan nyata sekelompok orang dalam kegiatan tertentu. Keterlibatan ini dapat berupa ide, kritik yang membangun, dorongan, atau

pelaksanaan aktual dari suatu kegiatan atau proyek tertentu. Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai mereka yang berpartisipasi, terlibat, dan diperlakukan sama dalam kegiatan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung, yang dimulai dari konsep merumuskan kebijakan, melaksanakan program, sampai dengan tahap mengevaluasi (Rubiantoro dan Haryanto, 2013). Dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan, keterlibatan masyarakat dalam pariwisata sangat penting (Lind & Simmons, 2017).

Pendekatan partisipatif akan memungkinkan diimplementasinya konsep pariwisata berkesinambungan, yang akan mengarah pada sikap positif di masyarakat dengan terbentuknya upaya untuk melindungi sumber daya alam lokal dan lingkungan agar tetap lestari (Tosun, 2006). Penduduk yang terlibat dalam pengurusan dan peningkatan wisata akan menuai keuntungan berupa meningkatnya kualitas kehidupan wisata dan lestarnya lingkungan alam tempat mereka tinggal (Nicholas, Thapa & Ko, 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Desa Wisata Gedangan Berbasis *Community Based Tourism*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan peneliti dapat

⁵Argyo Demartoto. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: UNS Press, hlm. 20.

menjelaskan bahwa pengelolaan Desa Wisata Gedangan dengan bentuk *Community Based Tourism* (CBT) dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi.

1) Tahap perencanaan merupakan tahap awal dari pembentukan Desa Wisata Gedangan, dalam tahap perencanaan diadakan musyawarah dan pengambilan keputusan tentang bagaimana pengelolaan desa wisata akan dilakukan kedepannya. Pendirian Desa Wisata Gedangan merupakan inisiatif masyarakat pada bulan November 2016, melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat, Desa Gedangan mulai beroperasi sebagai perusahaan wisata milik desa dengan nama Desa Wisata Edukasi Mangrove berdasarkan Peraturan Desa Gedangan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Demang Gedi, Desa Gedangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Usaha pariwisata di BUMDes diatur oleh Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatakan bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha dalam perekonomian dan/atau memberikan

pelayanan publik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Akibat belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Purworejo pada tahun 2016 yang mengatur tentang Desa Wisata, Desa Gedangan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan desa mengenai desa wisata karena tidak memiliki payung hukum dari pemerintah daerah. Namun masyarakat Desa Gedangan sudah mendesak pembentukan Desa Wisata sehingga unsur masyarakat, pemerintah desa dan BPD menentukan Desa Wisata ini berdiri dibawah BUMDes.

Baru pada tahun 2019 pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata dan sejak saat itu seluruh desa wisata di Kabupaten Purworejo baru mulai membuat SK atau peraturan desa tentang desa wisatanya termasuk dengan Desa Wisata Gedangan. Kini keberadaan Desa Wisata Gedangan ini sudah termasuk di dalam Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/236/2020 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Purworejo.

Keadaan pemukiman Desa Gedangan secara umum memenuhi standar lingkungan yang asri dan terdapat banyak potensi yang menyokong terciptanya desa wisata, yang melingkupi sebagai berikut:

- a) Lokasi desa yang strategis;
- b) Kondisi sosial masyarakat yang mendukung;
- c) Fasilitas jalan yang baik;
- d) Terdapat obyek wisata mangrove yang menarik wisatawan;
- e) Fasilitas umum yang layak tercukupi;
- f) Sebagian besar perumahan mempunyai MCK nya sendiri;
- g) Pencahayaan jalan tercukupi;
- h) Banyak masyarakat yang memiliki usaha mandiri yang mendukung desa wisata;
- i) Hasil pertanian yang melimpah;
- j) Tradisi yang masih kental;
- k) Warga desa yang ramah tamah.

2) **Tahap pelaksanaan** adalah tahap dimana pengelolaan desa wisata dilakukan bersama masyarakat. Meskipun berdiri di tahun 2016 namun Desa Wisata Gedangan mulai beroperasi menjalankan usaha wisata di tahun 2017. Pembiayaan desa wisata, administrasi desa wisata, serta sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari Desa Wisata Gedangan,

semuanya dapat diketahui pada tahap pelaksanaan ini.

a. Pendanaan

Pembentukan Desa Wisata ini tak lepas dari peran serta masyarakat dan obyek wisata Mangrove Demang Gedi sebagai awal berdirinya desa wisata. Sehingga uniknya pendanaan desa wisata ini dikelola dengan modal dari dana desa dan investasi masyarakat yang kemudian disebut dengan investor (penanam modal usaha desa wisata). Pada tahun 2016 dari unsur masyarakat desa yang mendaftarkan diri sebagai penanam modal desa wisata terdapat 40 orang yang masing – masing menanamkan modalnya sebesar Rp 3.200.000,00 yang setara dengan 1% saham Desa Wisata Gedangan.

b. Sarana & Prasarana

Dalam mendukung pengelolaan Desa Wisata Gedangan tentunya diperlukan sarana prasarana yang memadai agar pelaksanaan program wisata dapat berjalan baik. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Wisata Gedangan dikategorikan cukup baik. Terdapat homestay bagi wisatawan yang ingin menginap, berbagai peralatan penunjang program wisata seperti alat membatik dan *handy talky* yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya serta sarana & prasarana

penunjang kenyamanan wisatawan yang lain seperti mushola, gazebo dan balai pertemuan. Menurut penelitian, sarana dan prasarana desa pada umumnya dalam kondisi sangat baik dan dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan konsep desa wisata secara efektif.

c. Kepengurusan Desa Wisata Gedangan

Usaha Desa Wisata Gedangan yang dibentuk dibawah naungan BUMDes Demang Gedi melalui Peraturan Desa Gedangan Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 7 huruf (a) yang menyebutkan “BUMDes DEMANG GEDI menjalankan jenis usaha sebagai berikut: (a) bisnis wisata berupa taman edukasi mangrove”. Oleh karenanya kepengurusan Desa Wisata Gedangan juga dikelola oleh BUMDes Demang Gedi. BUMDes Demang Gedi sendiri sudah mengalami pergantian kepengurusan satu kali di tahun 2019 yang menghasilkan kepengurusan baru yaitu BUMDes periode 2019-2022.

Namun dalam tahap pelaksanaan ini terdapat hambatan yang berasal dari kepengurusan BUMDes yang baru di tahun 2019. Alasannya karena manajemen BUMDes yang baru kurang memperhatikan saran, masukan dan kritik dari masyarakat. Selain itu terdapat juga beberapa kebijakan manajemen BUMDes

periode 2019 – 2022 yang mengecewakan masyarakat diantaranya adalah:

- a) Melakukan pemutus hubungan kerja dengan Komangjo Foundation sebagai pihak ketiga;
- b) Tidak memiliki masterplan pengelolaan wisata yang jelas;
- c) Mengubah jenis wisata yang diterapkan yang semula paket wisata desa menjadi wisata umum dengan objek wisata utama Mangrove Demang Gedi secara sepihak.

Berubahnya jenis wisata yang semula paket wisata menjadi wisata umum secara sepihak sangat mempengaruhi kondisi sosial kemasyarakatan di Desa Gedangan. Masyarakat yang semula mendapatkan keuntungan dari paket wisata seperti penyedia homestay, catering desa, umkm, industri lokal dan pengelola outbond menjadi kehilangan pekerjaan karena wisata yang diterapkan hanya berfokus pada objek wisata Mangrove Demang Gedi.

Selain itu penghentian kerja sama antara pengelola wisata dengan Komangjo Foundation juga berdampak pada perencanaan pengelolaan wisata yang kurang baik. Pasalnya Komangjo Foundation selama ini berperan dalam memberikan arahan bagi pengelolaan pariwisata, namun sejak penghentian kerja

sama pengelola wisata tidak mampu membuat arah tujuan wisata yang baku sehingga arah tujuan wisata menjadi tidak jelas.

Selain itu manajemen BUMDes dan pokdarwis juga masih diisi oleh orang – orang lama yang berusia renta. Hal ini mengakibatkan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki kurang cakap dan menghambat pelaksanaan sejumlah program kerja wisata seperti penguasaan sosial media yang kurang baik dan mengakibatkan promosi wisata menjadi kurang maksimal.

3) Tahap Pengawasan dan evaluasi

merupakan tahap dimana idealnya masyarakat melakukan kontrol dalam pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata Gedangan. Alasannya karena berdasarkan teori *Community Based Tourism* masyarakat memegang peranan utama dalam tahap pengelolaan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pengawasan dilakukan oleh masyarakat dengan cara menilai kinerja pengelola desa wisata dalam hal ini BUMDes apakah sesuai dengan rencana kegiatan dan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian kegiatan evaluasi sendiri dilaksanakan oleh masyarakat, BPD,

Pemerintah Desa, Pengurus BUMDes (pengelola wisata), dan pengurus pokdarwis. Evaluasi dilakukan dengan musyawarah bersama antara masyarakat, pemerintah desa dan pengelola wisata yang diadakan setiap 1 tahun sekali di akhir tahun yang digunakan untuk menjangkau aspirasi/ide gagasan masyarakat.

Dalam musyawarah tersebut masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya terkait pelaksanaan pengelolaan desa wisata. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan kritik dan saran terkait pelaksanaan program yang tidak berjalan sesuai rencana. Keberlanjutan kritik dan saran tersebut ditampung dalam forum yang kemudian akan dipertimbangkan sesuai dengan skala prioritas.

2. Manfaat Pengelolaan Desa Wisata Gedangan Berbasis *Community Based Tourism*

Beberapa hasil dari pengelolaan Desa Wisata Gedangan melalui *Community Based Tourism (CBT)* ialah sebagai berikut:

1) Peningkatan Keterampilan dan Kemandirian Masyarakat

Bentuk pengelolaan pariwisata CBT yang diaplikasikan di Desa Gedangan setidaknya memberikan sedikit manfaat

dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat. Masyarakat dibekali pelatihan dan bimbingan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dalam klaster selatan dengan bentuk bimbingan dan pelatihan yaitu pelatihan pengelolaan wisata, pelatihan penyediaan homestay, pelatihan SOP wisata. Masyarakat juga dibekali pelatihan dari pemerintah desa terkait sikap terhadap wisatawan dan SOP. Selain itu masyarakat juga seringkali mendapatkan pelatihan dari pihak luar dengan bentuk pelatihan kepemimpinan, pelatihan pengolahan mangrove, pelatihan pembuatan cinderamata, pelatihan pembuatan teh dari mangrove jeruju, batik dari akar mangrove, dan makanan olahan dari hama tanaman mangrove.

Pelatihan dan bimbingan yang didapatkan oleh masyarakat tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat hal ini karena masyarakat yang dibekali keterampilan akan dapat mengaplikasikan ilmunya dalam pengelolaan wisata dan mendapatkan keuntungan.

2) Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Menurut temuan kajian yang dilakukan peneliti, warga Desa Wisata Gedangan yang berkecimpung dalam pengelolaan

wisata telah memetik keuntungan ekonomi dari ikut serta dalam pengelolaan wisata.

Indikator peningkatan ekonomi masyarakat ini dibuktikan dengan munculnya warung – warung makan di sekitar obyek wisata mangrove, usaha masyarakat lokal juga menjadi ramai pembeli seperti usaha pembuatan gula jawa, tambak udang, tambak ikan dan catering. Muncul juga sejumlah UMKM baru yang menjual produk – produk olahan mangrove yang dapat dijadikan cinderamata bagi wisatawan. Dari usaha – usaha ekonomi tersebut, masyarakat mendapatkan *income* yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kemampuan ekonomi masyarakat menjadi meningkat.

3) Tergalinya Sumber Daya Alam & Budaya

Tergalinya SDA & Budaya ini dibuktikan dengan pemanfaatan potensi lokal oleh masyarakat yaitu dengan adanya layanan *homestay* di rumah-rumah penduduk setempat, penyediaan air bersih dari air tanah desa, adanya atraksi tarian lokal yaitu kuda lumping dalam program wisata, dan pemanfaatan lahan tidak produktif milik desa menjadi area parkir wisata. Selain itu ada juga pemanfaatan hutan mangrove beserta ekosistemnya yang dibuktikan dengan adanya program

wisata membuat dari tanaman mangrove, membuat sabun dan teh dari tanaman mangrove, serta pengolahan hama tanaman mangrove yaitu kerang sumpil menjadi gongso kerang sumpil dan kerupuk kerang sumpil yang dijual oleh masyarakat kepada wisatawan yang berkunjung.

Pemanfaatan SDA & budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat sadar akan potensi wisata yang dimiliki dan mampu dikelola dengan baik tanpa mengganggu ekosistem, adat istiadat dan norma yang berlaku. Penggalan SDA & budaya ini dilakukan secara bersama – sama oleh masyarakat, pemerintah desa dan BUMDes bagi berjalannya pengelolaan desa wisata.

Terpenuhinya hampir seluruh *tool of community development* dalam pengelolaan pariwisata CBT di Desa Wisata Gedangan menjelaskan bahwa berbagai *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta (investor) dan terutama masyarakat mampu menjalankan perannya masing – masing dalam pengembangan potensi pariwisata sehingga pengelolaan pariwisata berjalan dengan baik. Pemerintah berhasil menjalankan perannya dengan baik yang dibuktikan dengan;

1. Sebagai motivator pemerintah desa maupun dinas pariwisata terus memberikan semangat, motivasi dan

dorongan kepada masyarakat dan investor agar geliat usaha desa wisata tidak menurun;

2. Sebagai fasilitator pemerintah desa berperan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan investor (Kolangjo Foundation) dalam mengelola wisata secara bersama – sama. Pemerintah desa juga berperan sebagai jembatan penghubung bagi institusi atau LSM diluar desa yang tertarik untuk bekerja sama dengan dinas pariwisata.

Pemerintah desa juga ikut serta memfasilitasi pengelolaan desa wisata dengan sarana prasarana yang dibutuhkan seperti informasi dan pendanaan di awal berdirinya serta memberikan bantuan dana desa dalam RPJMDes untuk pengelolaan desa wisata. Selain itu dinas pariwisata juga berkontribusi terhadap program pengelolaan pariwisata desa dengan menyediakan bimbingan dan pelatihan dimana Desa Wisata Gedangan masuk dalam klaster selatan bimbingan desa wisata Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.

3. Sebagai dinamisator pemerintah desa mampu menciptakan situasi yang nyaman bagi masyarakat dan investor (Kolangjo Foundation) yang membuat ketiganya bersinergi dengan baik dan

membentuk simbiosis mutualisme dalam mengembangkan pariwisata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan dapat dibuat dari temuan studi dan hasil diskusi yang telah disajikan sejauh ini:

1. Di Desa Gedangan, pengelolaan wisata berbasis masyarakat dilakukan dalam tiga tahap, yaitu kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan terakhir kegiatan mengevaluasi. Dalam tahap perencanaan dilakukan kegiatan penyuluhan sadar wisata, dan sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan masyarakat berpartisipasi aktif memberikan kontribusi menyediakan sarana – prasarana seperti homestay, air bersih, makanan dan minuman, gotong royong membangun *tracking* wisata, ikut serta dalam bimbingan dan pelatihan yang diberikan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Tahap ketiga, yaitu tahap pengawasan dan evaluasi yang melibatkan peran masyarakat, pengelola wisata, pemerintah desa dan Komangjo Foundation dengan mengadakan pertemuan rutin di akhir tahun yang menyediakan ruang publik untuk memonitoring jalannya usaha desa

wisata, menyampaikan saran dan masukan serta mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi melalui musyawarah bersama.

2. Peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan budaya secara maksimal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui pengurusan Desa Wisata Gedangan. Karena tingginya partisipasi masyarakat, semangat, gotong royong, dan kerjasama yang terjalin oleh pemerintah desa, masyarakat, pihak ketiga, dan pengelola pariwisata di Desa Gedangan maka pengelolaan pariwisata berlandaskan masyarakat pada awalnya berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat dan berjalan sesuai dengan konsep *Community Based Tourism*. Namun sejak tahun 2019 hingga saat ini pengelolaan Desa Wisata Gedangan mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh pergantian kepengurusan BUMDes di tahun 2019 yang melahirkan SDM pengelola yang kurang baik, arah usaha wisata yang kurang jelas, dan kendala promosi dari pengelola internal. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan wisata, jumlah wisatawan yang kian menurun

dari tahun ke tahun, serta beberapa usaha ekonomi masyarakat yang mendukung pengelolaan wisata di Desa Wisata Gedangan satu persatu mulai gulung tikar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran bagi pihak – pihak terkait agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan lebih maksimal diantaranya:

1. Pemerintah Desa Gedangan sebaiknya segera menyelesaikan SK atau peraturan desa terkait pembentukan Desa Wisata Gedangan karena saat ini sudah ada SK Bupati terkait Desa Wisata dan berdirinya Desa Wisata Gedangan hanya berlandaskan SK Pembentukan BUMDes. Selain itu pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga sudah mendesak desa – desa wisata di Kabupaten Purworejo, termasuk Desa Gedangan untuk membuat payung hukum pembentukan Desa Wisata.
2. Pengelola desa wisata, dalam hal ini BUMDes Demang Gedi sekiranya dapat memperbaiki masalah internal khususnya berkaitan dengan sikap pengurus dalam merespon saran, kritik dan masukan dari masyarakat agar aspirasi masyarakat lebih didengarkan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata kembali meningkat.
3. Pemerintah Desa Gedangan sekiranya dapat membentuk pengelola desa wisata diluar BUMDes dan Pokdarwis yang khusus mengelola desa wisata. Pembentukan pengelola desa wisata diluar pengurus BUMDes dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi SDM seperti karang taruna yang ada dan dengan demikian sekaligus juga dapat memaksimalkan promosi terkait usaha wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaedi. 2012. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Yogyakarta: al-Ruzz Media.
- Basrowi dan Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta
- Burhan Bungin. 2014. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Prenada Media Group
- Demartoto Argyo. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: UNS Press
- Hadiwijoyo, Surya Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Herdiansyah Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty

- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pitana, I Gede dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI
- Poerwadarminta, WJS. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Santoso, Sastropetro. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Suwantoro Gamal. 2001 *Dasar – Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI
- Theresia A. dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Taliziduhu Ndraha. 1987. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara
- Tika H Moh Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Timor mahardika. (2001). *Pendidikan politik pembangunan desa*. Pustaka utama: Yogyakarta.
- Yoeti Oka A. 2001. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Angkasa
- Yoeti Oka A. 2016. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka
- Jurnal**
- Hari Hermawan. 2020. Community participation tourist attraction development in Jabal Kelor - a case study. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 9(1)*.
- Kanuna Resky Sirupang. 2014. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara. *Skripsi: Universitas Hasanudin Makassar*
- Kuncahyawati, H. 2016. Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Pedagang Pasar Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus: Pasar Krendetan). Yogyakarta: *Skripsi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Made Heny Urmila Dewi. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara, Vol. 3 No. 2 hlm 131*. Bali : Universitas Udayana
- Muhammad Fahmi. 2015. Bentuk Pengelolaan PotensiPariwisata Pantai Pangandaran Jawa Barat. *Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta*.
- Nisrina Ariz. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengembangan Objek Wisata DAM Margotirto Di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. *Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung*
- Sabon, Tommy, dan Permata Citra 2018. Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada Asean Economic Community. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 8 (2)*.
- Sa'idah Arfianti Nur. 2017. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar

Lampung. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Islam Lampung

Sadono Y. (2013). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Pembangunan wilayah dan kota. Volume 9, Edisi: Maret*

Savitri Sarah Nila. 2018. Upaya Pemerintah Dalam Penerapan Sapta Pesona Pariwisata di Kabupaten Magetan. *Skripsi: Universitas Diponegoro*

Suciati Ari. 2017. Manajemen Pengelolaan Objek Wisata Situs Tasikardi Oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. *Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penetapan Potensi Wisata Kabupaten Purworejo Sebagai Daya Tarik Wisata

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata

Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/236/2020 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Purworejo

Peraturan Desa Gedangan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Demang Gedi Desa Gedangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

Surat Keputusan Kepala Desa Gedangan Nomor 141/20/X/2016 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Tani Hutan “Demang Gedi”

Internet

Dev Yandip. Wujudkan Visi Misi, Perlu Tindakan Yang Konkrit Terukur dan Komprehensif. 2017. Dalam <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/wujudkan-visi-misi-perlu-tindakan-yang-konkrit-terukur-dan-komprehensif/> Diakses pada tanggal 10 September pukul 21.36 WIB.

Kementerian Pariwisata. 2018. Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2018. Diakses dari [file:///C:/Users/acer/Downloads/media_1560915745_LAKIP_KEMENPAR_TA_2018%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/media_1560915745_LAKIP_KEMENPAR_TA_2018%20(1).pdf) pada 4 September 2019.